

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT
(Studi Implementasi Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RINDA PUJI LESTARI
NIM. 1517015

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT
(Studi Implemenstasi Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RINDA PUJI LESTARI
NIM. 1517015

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rinda Puji Lestari

Nim : 1517015

Judul : **PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT (Studi Implemenstasi Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Batang)**

Menyatakan bahwa skripsi ini hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Mei 2021

Yang menyatakan,



RINDA PUJI LESTARI

NIM. 1517015

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

Desa Karangjampo RW04/RW01 Kec. Tirto Kab. Pekalongan

Lampiran : 3 (Tiga) eksempler

Hal : Naskah skripsi sdri. Rinda Puji Lestari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Tatanegara

di-

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Rinda Puji Lestari

Nim : 1517015

Judul : **PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT (Studi Implemenstasi Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Batang)**

Dengan permohonan ini agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosyahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 2 Juni 2021

Pembimbing



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
NIP: 1970701992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan No.52, Rowolaku, Kajen, PekalonganTelp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423428

PENGESAHAN

Dekan FakultasSyariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) mengesahkan skripsi saudara:

Nama : **RINDA PUJILESTARI**
NIM : **1517015**
Judul Skripsi : **PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN
POLITIK MASYARAKAT (STUDI
IMPLEMENTASI PASAL 34 AYAT (3B) UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG
PARTAI POLITIK DI KABUPATEN BATANG)**

Yang telah diujikan pada hari Senin, Tanggal Empat Belas Bulan Juni Tahun 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
NIP: 1970701992032011

Dewan Penguji

Penguji I

UswatunKhasanah, M.S.I
NIP. 198306132015032004

Penguji II

Jumailah, M. S.I
NITK. 19830518201608 D2 009

Pekalongan, 14 Juni 2021

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang didalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	H	ha (dengan titik di bawah)

خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
سین	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	S	es (dengan titik di bawah)
صد	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We

ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = A		أ = ā
إ = I	إي = Ai	إي = ī
أ = U	أو = Au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة Ditulis *mar'atun jamilah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة Ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا Ditulis *rabbana*

البر Ditulis *al-bir*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rajulu*

السيدة Ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan duhubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر Ditulis *al-qamar*

البديع Ditulis *al-badi'*

الجلال Ditulis *al-jalil*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apotrof /'/.

Contoh:

أمرت Ditulis *umirtu*

شيء Ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Sujud syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat-Nya.

Bapak dan ibu tercinta bapak Mulyono dan ibu Istikharoh yang selama ini sudah bekerja keras bahu membahu membiayai studi saya dan senantiasa memberikan semangat dan motivasi untuk saya.

Kakak-kakak tercinta yang selalu memberikan semangat, masukan dan dukungan untuk saya.

Keluarga besar HTN angkatan 2017.

Keluarga besar Resimen Mahasiswa Batalyon 955 Kusuma Bangsa.

Semua pihak yang mendukung dan mendo'akan dalam menyelesaikan skripsi

MOTTO

“مَنْ جَدَّ وَجَدَّ”

(Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapat kesuksesan)

“مَنْ يَزْرَعُ يَحْصُدُ”

(Barang siapa yang menanam pasti akan memetik)

ABSTRAK

Rinda Puji Lestari, 1517015, 2021. Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat (Studi Implementasi Pasal 34 Ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Batang). Skripsi Jurusan Hukum Tatanegara. Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Pembimbing Drs. Hj Siti Qomariyah, M.A.

Pendidikan politik masyarakat merupakan salah satu peran yang harus dilaksanakan oleh partai politik sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. pendidikan politik yaitu proses pengajaran dan memberikan pemahaman mengenai kewajiban serta hak sebagai warga negara pada kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang politik sebagai warga negara. Yang menjadi persamasalahan disini adalah bagaimana pelaksanaan pendidikan politik masyarakat oleh partai politik di Kabupaten Batang apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 34 ayat (3b) Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Batang dan untuk menganalisis implementasi pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik di Kabupaten Batang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif dan selanjutnya peneliti menggunakan logika berfikir induktif dalam penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: *pertama*, bahwa partai politik di Kabupaten Batang telah melaksanakan peranya dalam pendidikan politik masyarakat di kabupaten Batang. Dalam prakteknya pendidikan politik ini mengambil bentuk kgiatan yaitu berupa silaturahmi masyarakat, seminar, konsolidasi, sekolah kader partai, dan *reses* yang diselingi dengan pendidikan politik. Namun, pelaksanaanya belum merata dan intensif karena sasaranya hanya terbatas pada kader dan mengambil dari perwakilan masyarakat tertentu dan belum menjangkau masyarakat luas. Dalam pelaksanaanya hanya dilaksanakan pada momen-momen tertentu yang tidak terjadwal secara tetap. *Kedua*, Partai Politik di Kabupaten Batang telah mengimplementasikan pasal 34 ayat (3b) Undang-undang nomor 2 tahun 2011, namun dalam pelaksanaanya belum secara kualitatif bisa mewujudkan tujuan yang termuat dalam Undang-Undang sehingga pendidikan politik masyarakat kurang dirasakan masyarakat luas dan kurang membawa dampak hasil bagi peningkatan kesadaran politik masyarakat terutama peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum maupun pilkada

Kata kunci : Peran Partai Politik, Pendidikan Politik, Kabupaten Batang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah, dan inanyah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan tugas di dunia ini untuk selalu berfikir bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang telah diciptakan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaat-Nya di hari akhir.

Alhamdulillah, penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan, dengan judul Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat (Implementasi Pasal 34 Ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Batang).

Dalam Proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu, pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
4. Ibu Jumailah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan sekaligus dosen wali saya terima kasih atas bimbingannya selama kuliah.
5. Ibu Drs. Hj. Siti Qamariyah, M.A, selaku dosen pembimbing skripsi saya yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan memberikan arahan, koreksi, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap dosen IAIN Pekalongan khususnya dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi masa depan kami, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
 7. Segenap staf jurusan Hukum Tatanegara dan akademik serta staf perpustakaan IAIN Pekalongan.
 8. Pengurus partai politik PDI-Perjuangan, Golkar dan PKB Kabupaten Batang, yang telah memberikan izin penelitian dan telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi.
 9. Masyarakat Kabupatenn Batang yang telah bersedia menjadi informan untuk menyelesaikan skripsi ini.
 10. Orang tua tercinta, bapak dan ibu yang senantiasa mendoakan saya dan memberikan dukungan moril maupun meteril demi selesainya studi saya.
 11. Seluruh pihak yang turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya selain iringan doa semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang berlimpah.
- Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya. *Aamiin.*

Batang, 7 Mei 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Penelitian yang Relevan	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan Skripsi	19
BAB II KAJIAN TEORI	21
A. Partai Politik.....	21
1. Definisi Partai Politik.....	21

2.	Sistem Kepartaian	24
3.	Sejarah Partai Politik Di Indonesia	25
4.	Fungsi dan Tujuan Partai Politik.....	29
5.	Partai Politik dalam Islam.....	33
6.	Peran Partai Politik	36
B.	Pendidikan Politik	43
1.	Konsep Pendidikan Politik.....	43
2.	Unsur Pendidikan Politik	46
3.	Pendidikan Politik dalam Islam	54
4.	Tujuan Pendidikan Politik.....	62
BAB III PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DI KABUPATEN BATANG		66
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	66
1.	Sejarah Kabupaten Batang.....	66
2.	Letak Geografis Kabupaten Batang	67
3.	Potensi SDA dan SDM di Kabupaten Batang.....	68
4.	Kehidupan Politik Kabupaten Batang.....	69
B.	Profil Partai Politik Subjek Penelitian Di Kabupaten Batang.....	70
1.	Profil DPC Partai PDI Perjuangan Kabupaten Batang	71
2.	Profil DPD Partai Golkar Kabupaten Batang	75
3.	Profil DPC Partai PKB Kabupaten Batang	78
C.	Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat di Kabupaten Batang.....	81
1.	Peran DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang Dalam Pendidikan Politik Masyarakat.....	82
2.	Peran DPD Partai Golkar Kabupaten Batang Dalam Pendidikan Politik Masyarakat	90
3.	Peran DPC PKB Kabupaten Batang Dalam Pendidikan Politik Masyarakat	94
BAB IV ANALISI PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT DAN IMPLEMENTASI PASAL 34 AYAT (3b)		

**UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI
POLITIK DI KABUPATEN BATANG 108**

A. Analisis Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat di
Kabupaten Batang 108

B. Analisis Implementasi Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011 Tentang Partai Politik di Kabupaten Batang. 114

BAB V PENUTUP 119

A. Kesimpulan 119

B. Saran..... 120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Struktur Komposisi Dan Personalia DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang.....	57
Tabel 3.2 Struktur Komposisi Dan Personalia DPD Golkar Kabupaten Batang ..	59
Tabel 3.3 Struktur Komposisi Dan Personalia DPD PKB Kabupaten Batang	61

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Bukti Telah Malaksanakan Penelitian

Lampiran II : Dokumentasi Penelitian

Lampiran III : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara demokrasi yang sejak era reformasi pemilihan umum sebagai sarana demokrasi dilaksanakan secara langsung. Suksesnya demokrasi dan suksesnya pemilu diantaranya dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap pemilihan umum maupun pilkada. Pendidikan politik adalah hal yang sangat penting dalam rangka mencerdaskan masyarakat dibidang politik dan akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Pendidikan merupakan salah satu tanggungjawab yang harus dilakukan partai politik. Tingkat keikutsertaan dan partisipasi masyarakat dalam berpolitik kini terlihat kurang atau rendah. Masyarakat sebagai warga negara masih banyak yang belum mengetahui dan paham apa saja hak dan kewajibannya dalam bidang politik sehingga mempengaruhi keikutsertaanya di bidang politik. Banyaknya faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya keikutsertaan masyarakat tersebut tidak lepas dari peran penting partai politik. Partai politik yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan pendidikan politik diharapkan dapat mengedukasi masyarakat melalui fungsinya, karena sejauh ini bagaimana fungsi partai politik dalam pemberian pendidikan politik kepada masyarakat masih dipertanyakan.

Gambaran rendahnya partisipasi politik masyarakat dapat dilihat misalnya dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah untuk wilayah daerah Kabupaten Batang hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Gubernur Jawa Tengah tahun 2018, dari 589.566 pemilih yang terdaftar dalam DPT Kabupaten Batang, hanya ada sekitar 374.058 pemilih yang berpartisipasi, artinya sebanyak 215.508 warga tidak menggunakan hak suaranya. Angka partisipasi penggunaan suara dalam pemilihan Gubernur tersebut belum memenuhi dari target yaitu 77,5% karena hanya mencapai 63,45%.¹ Tingkat partisipasi pengguna hak pilih masyarakat di Kabupaten Batang termasuk rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di Jawa Tengah yaitu dengan Kabupaten Semarang tingkat yang partisipasinya mencapai 75,08%, Kota Semarang 71,80%, Kota Tegal 71,05%, Kabupaten Magelang 79,09%, Kabupaten Karanganyar 80,02%, Kabupaten Kudus 84,27%, Kabupaten Temanggung 85,32%, Kota Surakarta 76,72%, dan Kota Salatiga 78,07%.²

Penelitian terdahulu terkait pelaksanaan pendidikan politik oleh partai politik telah dilakukan yaitu oleh Efen Sandika (2018), di Mesuji aktivitas pendidikan politik selaras dengan fungsinya, kegiatannya dilakukan dengan bentuk pelatihan kepemimpinan, dialog publik, debat terbuka, kampanye dialogis, kelompok binaan atau menjalin mitra dan sejenisnya. Selain itu, penelitian yang dilakukan Didin Septa Rahmadi

¹Anggota KPU Kabupaten Batang, *Wawancara Pribadi* di Kantor KPU Kabupaten Batang, 13 Agustus 2020.

² Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah, *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018*, h. 155-156.

(2016), dalam penelitiannya ditemukan bahwa Elit politik lokal di Kabupaten Lombok Timur mereka belum memberikan pendidikan politik pada generasi muda misalnya mahasiswa pada umumnya. Kegiatan yang dilakukan masih fokus pada konsolidasi konstituen yang sering dilaksanakan pada saat kampanye. Kampanye politik dimaknai sama seperti pendidikan politik, dan pelaksanaannya masih minim tidak terstruktur dan terbatas pada konstituen. Kegiatan tersebut dimaknai bersifat indoktrinasi, karena proses pelaksanaannya fokus pada tujuan guna menjaring pendukung sebanyak-banyaknya.

Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, peneliti menemukan kekurangan dari kedua penelitian yang sudah dilakukan, bahwa dalam penelitian terdahulutersebut hanya fokus meneliti dari sudut partai politik sebagai pelaksana pendidikan politik, peneliti tersebut belum melakukan penelitian dari sudut pandang masyarakat yaitu dengan meneliti langsung kepada masyarakat untuk membuktikan kebenaran mengenai bagaimana pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan partai politik, bagaimana sikap dan dampak dari pendidikan politik. Dalam penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya belum dibahas mengenai bagaimana seharusnya pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 34 ayat (3b) tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik berkaitan dengan a.) Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila,

UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, b.) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, 3.)Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.³

Posisi partai politik disinilah yang diharapkan dapat membantu dalam penyelenggaraan pendidikan politik terhadap masyarakat, karena partai politik merupakan lembaga infrastruktur negara yang bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.⁴Pelaksanaan peran partai politikdalam pemberian pendidikan politik masyarakat penting diteliti dalam mengungkap praktik pendidikan politik yang dilaksanakan olehpartaipolitik seperti diaturoleh UU Nomor 2 Tahun 2011 pasal 34 ayat (3b) tentang Partai Politik. Penelitian ini akan dapat memberikan gambaran kemungkinan latar belakang rendahnya partisipasi politik masyarakat sehingga dapat menjadi evaluasi dan perbaikan bersama untuk kemudian ada peningkatan yang dilakukan partai politik dalam melaksanakan salah satu fungsinya dari partai politik,dan penelitian ini diharapkan mampu melengkapi dari kekurangan penelitian terdahulu.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas maka penulis akan melaksanakan penelitian tentang

³Republik Indonesia, undang-undang tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun2011 tentang partai Politik.

⁴ Aprillio Poppy Belladonna, *Imeplemntasi Fungsi Partai Politik Sebagai Wahana Pendidikan Politik di Masyarakat*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Volume 2, Nomor 2, Desember 2018, h. 32.

pelaksanaan peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat, dengan mengambil lokasi di Kabupaten Batang dengan pertimbangan karena rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat batang dan kurangnya pengetahuan masyarakat di Kabupaten Batang terhadap fungsi partai politik dalam pelaksanaan pendidikan politik sebagaimana tertuang dalam pasal 34 ayat (3b) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai politik. Selanjutnya penelitian tersebut akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul **“Peran Partai Politik Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Masyarakat (Studi Implementasi Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Di Kabupaten Batang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Batang?
2. Bagaimana implementasi pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik di Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat di Kabupaten Batang.

2. Untuk menganalisis implementasi pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik di Kabupaten Batang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara khususnya terkait pelaksanaan pendidikan politik masyarakat oleh partai politik sebagai implementasi pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi pada penelitian berikutnya dengan materi sejenis.
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat luas tentang hak mereka untuk memperoleh pendidikan politik yang harus dilakukan oleh partai politik.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi para pimpinan partai politik agar dalam melaksanakan pendidikan politik pelaksanaannya ditahun-tahun mendatang ditingkatkan lagi sehingga dapat terwujud tujuan Undang-undang.

E. Kerangka Teori

1. Partai Politik

Peran sebagai perilaku-perilaku yang diharapkan dimiliki seseorang dan diterapkan dalam kehidupan terutama oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, tersebut diharapkan mampu membuat suatu perubahan dan harapan yang mengarah pada kemajuan. Hal tersebut mampu menjadi acuan dalam menjalankan tugas sehingga kinerjanya dapat dilaksanakan denganmaksimal oleh penerima tanggung jawab (Departemen Pendidikan Nasional, 2005).⁵

Partai politik adalah kelompok terorganisir dimana para anggota kelompok ini mempunyai pandangan serta tujuan sama dibidang politik, tujuannya yaitu untuk memperoleh kekuasaan secara konstitusional dan melaksanakan kebijakan-kebijakan. Sebagai bagian dari infrastruktur politik dalam sebuah negara terdapat beberapa fungsi dari partai politik fungsi penting salah satunya menjadi sarana pendidikan politik di masyarakat luas agar msyarakat menjadi sadar terhadap hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.sebagai salah satu komponen penting dari sistem sosial organisasi, dalam sebuah organisasi harus dipastikan bahwa peran para anggotanya telah dijabarkan dengan jelas. Dengan adanya peran yang jelas dari masing-masing anggota organisasi akan terbentuk identitas dan kemampuan

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 854.

anggota tersebut dalam bekerja.⁶ Dalam penelitian ini Peran yang ingin penulis kaji yaitu peran partai politik Kabupaten Batang dalam pelaksanaan pendidikan politik di masyarakat.

2. Pendidikan Politik

Definisi pendidikan politik disebutkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik pasal 1 ayat (4) yaitu “proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.”⁷ Pendidikan politik dimaknai sebagai *political forming* atau *bildung*. Dikatakan *forming* dilihat dari substansinya yaitu untuk membentuk individu politik yang sadar terhadap status dan kedudukan politiknya didalam masyarakat. Disebut *bildung* (pendidikan atau pembentukan diri sendiri), dikarenakan pengistilahan itu berkaitan kegiatan yang dilakukan secara pribadi yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab untuk membentuk pribadi yang paham terhadap kedudukan politiknya.⁸

Pendidikan politik disebut sebagai bentuk aktivitas berupa pengajaran kepada masyarakat berkaitan dengan, norma-norma, simbol-

⁶M. Alfi Syahri, “Peran Wewenang Majelis Tuha Peut Dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsiyah*, Vol. III No. 1-22, 1-26 Juni 2018, h. 7.

⁷Republik Indonesia, undang-undang tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

⁸Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Guepedia, 2019), h. 7.

simbol dan nilai-nilai, politik melalui beberapa media seperti sekolah, pemerintah, dan juga partai politik. Perlunya pendidikan politik untuk memberikan gambaran mengenai hal-hal mendidik dan mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan politik, cara berpolitik yang benar dan cara bersaing yang sehat. Proses pendidikan politik bisa dilaksanakan dengan kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, seminar serta diskusi dan keikutsertaan pada forum pertemuan.⁹

Alfian menjelaskan: “Pendidikan politik (dalam arti yang lebih ketat) sebagai bentuk upaya untuk mengubah proses pendidikan politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul-betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Yang hasilnya dapat memunculkan perilaku dan tindakan politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal dan juga melahirkan suatu kebudayaan baru”. Baru-baru ini untuk mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis, dinamis, dan efisien bangsa Indonesia melakukan pembaharuan salah satunya dalam bidang pendidikan politik yang diharapkan dapat memberikan hasil positif dalam kehidupan politik.¹⁰

Politik bukanlah monopoli pemimpin, politik merupakan milik bersama bagi setiap warga negara. Dengan adanya pendidikan politik memunculkan skeptisisme politik dan wawasan politik mengenai

⁹Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep, dan Isu Strategis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 21.

¹⁰Payerli Pasaribu, “Peran Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik”, (*Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 5 (1) 2017, h. 56.

peristiwa-peristiwa politik dengan seluruh jaringan-jaringannya. Hal tersebut membuat masyarakat menjadi paham terhadap fungsinya dan bagaimana sikap seharusnya dalam bidang politik misalnya dalam fungsi kontrol politik, pembuktian terhadap keadaan situasi politik yang sedang berjalan, dan lebih menekankan pada kegiatan politik secara sadar dan sesuai dengan asas-asas demokrasi sejati.¹¹ Dari penjelasan diatas mampu disimpulkan, pendidikan politik yaitu proses pengajaran dan memberikan pemahaman mengenai kewajiban serta hak sebagai warga negara pada kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam bidang politik sebagai warga negara.

Pendidikan politik memiliki tujuan yang sangat jelas sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, tujuan partai politik melaksanakan pendidikan politik terhadap masyarakat antara lain: “a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.”¹²

¹¹Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Guepedia, 2019) , h. 9.

¹²Republik Indonesia, Undang-undang tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Pendidikan politik memiliki posisi yang sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat yang sadar politik dan mau berpartisipasi dalam politik demi mewujudkan suatu tatanan politik yang ideal dalam kehidupan bernegara serta berbangsa dengan dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dalam mewarnai sistem politik demokrasi Pancasila.¹³ Dalam pasal 34 ayat (3b) disebutkan bahwa pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik berkaitan dengan hal-hal yaitu:”a.) Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, b.) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, 3.)Pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.”¹⁴ Istilah pendidikan politik dalam islam disebut dengan *Tarbiyah Siyasah*. Pendidikan politik termasuk salah satu *concern* utama pemikir-pemikir muslim seperti Al-Ghazali, Al-Mawardi, dan Ibnu Khaldun. *Tarbiyah Siyasah* didefinisikan sebagai upaya membangun dan menumbuhkan keyakinan dan nilai dalam rangka membentuk kepribadian politik yang dikehendaki dan terbentuknya

¹³Dudih Sutrisman, *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*, (Jakarta: Guepedia, 2019) , h. 12

¹⁴Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Partai Politik, Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

orientasi an sensitivitas politik para anggota masyarakat sehingga menjadi partisipan aktif dalam kehidupan keseharian mereka.¹⁵

Dalam tarbiyah siyasah pendidikan politik terdiri tiga komponen, yaitu: *pertama*, orientasi kognitif, yaitu berupa pengetahuan dan keyakinan tentang politik, peranan dan kewajiban, serta segala *input* dan *outputnya*; *kedua*, orientasi efektif, yaitu perasaan tentang sistem politik, peranannya, aktor dan penampilannya; *ketiga*, orientasi evaluatif yaitu, keputusan dan pendapat objek politik yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan karaktersitik dengan informasi dan emosi.¹⁶

F. Penelitian yang Relevan

Dalam bidang karya ilmiah, penulis menemukan beberapa judul yang telah meneliti peran partai politik. Beberapa penelitian terdahulu yang telah ditemukan dan mampu dijadikan acuan memperdalam judul dari penelitian yang diambil. Terdapat tiga penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan, yaitu sebagai dibawah ini:

Afen Sandika (2017) pada skripsinya yang berjudul “Peran PDI Perjuangan Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang Pilkada Mesuji Tahun 2017”.¹⁷Berdasarkan penelitiannya hasil penelitiannya

¹⁵ Wery Gusmansyah, Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Menurut UU No.2 Tahun 2011 Dan Hukum Islam, *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Al-Imarah, Vol IV, No. II, Tahun 2019, h.188

¹⁶ Mila Hasanah, Pendidikan Poitik Dalam Al-Qur’an, *Ijtihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*, Vol. XII, No. XXI, April 2014, h.103

¹⁷Efen Sandika, “Peran PDI Perjuangan dalam Pendidikan Politik di Masyarakat Mnjelang Pilkada Mesuji Tahun 2017”, *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).

menunjukkan bahwa partai PDI Perjuangan di Mesuji pendidikan politiknya terfokus kepada para kadernya kemudian para kader memberikan pendidikan politik kepada para masyarakat dalam bentuk latihan kepemimpinan, dialog publik, kampanye, kelompok binaan, debat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak di objek penelitiannya yang sama-sama membahas peran partai politik dalam pendidikan politik, sedangkan perbedaannya penelitian tersebut terfokus pada salah satu partai politik, sedangkan penulis tidak hanya terfokus pada salah satu partai politik dan dalam penelitian tersebut peneliti belum melakukan penelitian dari sudut pandang masyarakat sebagai penerima pendidikan politik.

Edy Sanjaya Sitepu (2019) pada skripsinya yang berjudul “Peran Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015”.¹⁸ Hasil dari penelitiannya yaitu bahwa partai PKS sudah melaksanakan pendidikan politik yaitu berupa *satu*, halaqoh, yaitu perkumpulan dengan masyarakat berupa diskusi berupa hubungan islam dan politik. *Kedua*, TOP (*Training Oreientation* Partai) yaitu mengenalkan tentang partai PKS kepada msyarakat serta pentingnya memilih saat pilkada karena hubungan agama dan politik tidak dapat dipisahkan. *Ketiga*, Tarbiyah Tsaqifah, pembinaan aktivis dakwah yang berkesinambungan. Dalam penelitian ini partai PKS sudah berupaya

¹⁸Edy Sanjaya Sitepu , “Peran Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015”,*Skripsi* UIN Sumatera Utara, (Medan,UIN Sumatera Utara: 2019).

meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Persamaan penelitian diatas dengan penulis yaitu pada objek penelitiannya yang sama-sama membahas peran partai politik dalam pendidikan politik, sedangkan perbedaannya penelitian tersebut terfokus pada salah satu partai politik, sedangkan penulis tidak hanya terfokus pada salah satu partai politik untuk mengetahui pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik dan dalam penelitian tersebut peneliti fokus dalam peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Itok Wicaksono (2017) pada jurnal penelitiannya yang berjudul “Peran Partai Politik Dalam Partisipasi dan Aspirasi Politik di Tingkat Pemerintah Desa (*The Role of Political Parties Participation And Political, Aspiration In The Village Government Level*)”.¹⁹ Dalam penelitiannya ini menunjukkan bahwa di tiga desa tersebut partai politik sudah melaksanakan perannya yaitu sebagai meningkatkan partisipasi masyarakat dan partai politik sebagai sarana penghubung antara pemerintah dan masyarakat dengan menyerap aspirasi masyarakat desa yang kemudian disampaikan kepada pemerintah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji mengenai peran partai politik, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut lebih fokus terhadap peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat, sedangkan penulis lebih fokus kepada peran partai politik dalam pendidikan politik di masyarakat.

¹⁹Itok Wicaksono, “Peran Partai Politik Dalam Partisipasi dan Aspirasi Politik di Tingkat Pemerintah Desa (*The Role of Political Parties Participation And Political, Aspiration In The Village Government Level*)”, (Jember, *Jurnal Politico Vol. 7 No.2 September 2017*).

Berdasarkan beberapa tinjauan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan peneliti susun memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya. Perbedaan itu terletak pada subjek penelitian, dari penelitian yang sudah dilakukan diatas penelitian hanya fokus dilakukan di salah satu partai politik, sedangkan penelitian ini akan meneliti tiga partai politik dalam melaksanakan perannya. Penelitian terdahulu tersebut peneliti hanya fokus pada salah satu sudut pandang, yaitu dari sudut pandang partai politik, sedangkan penelitian ini akan meneliti dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang dari partai politik dan sudut pandang dari masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan peran partai politik. Penelitian terdahulu juga belum memuat tinjauan pelaksanaan peran politik sebagaimana diatur dalam Undang-undang, sedangkan dalam penelitian ini peneliti akan meneliti bagaimana seharusnya pelaksanaan peran partai politik yang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*, Penelitian ini dilakukan dengan menggali peran partai politik pada pemberian pendidikan politik bagi masyarakat Kabupaten Batang. Pendekatan Penelitian, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu berusaha mendalami dan mengerti peristiwa yang terjadi

dengan mengamati kejadian secara langsung dan mencoba berinteraksi dengan anggota partai politik dan masyarakat.²⁰

2. Jenis Data

a.) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupadata yang didapat langsung dari partai politik dan masyarakat terkait pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Batang.

b.) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini berupa data dokumen atau data laporan yang sudah tersedia tentang politik dan peran fungsinya dalam pendidikan masyarakat.

3. Populasi dan sampel

a.) Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi yaitu partai politik yang ada di Kabupaten Batang yang berjumlah 16 partai.

b.) Sampel

Pengambilan sampel yang digunakan peneliti yaitu *Purposive Sampling*, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui peran partai politik Kabupten Batang dalam pelaksanaan pendidikan politik di masyarakat, dengan mempertimbangkan perolehan suara

²⁰Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 6.

terbanyak pada pemilu 2019 yaitu partai PKB 18,94%, partai PDIP 18,29%, dan partai Golkar 16,16%.²¹ Maka pada penelitian ini yang menjadi sampel yaitu 3 partai yang ada di Kabupaten Batang yaitu, DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Batang , DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Batang, DPC Partai PDI-Perjuangan Kabupaten Batang. Pada penelitian ini peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling*, dalam penelitian ini peneliti akan meneliti secara bergulir dari satu responden ke responden yang lain yaitu anggota dari partai politik DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Batang, DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Batang, DPC Partai PDI-Perjuangan Kabupaten Batang dan masyarakat, sampai ditemukan data yang cukup mengenai pelaksanaan peran partai politik dalam pendidikan politik bagi masyarakat di Kabupaten Batang.

4. Teknik Pengumpulan Data

a.) Teknik Observasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengamati bagaimana bentuk pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat, sikap dan dampak dari pelaksanaan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik di Kabupaten Batang.

²¹Anggota KPU Kabupaten Batang, *Wawancara Pribadi* di Kantor KPU Kabupaten Batang, 13 Agustus 2020.

b.) Teknik Wawancara

Peneliti menggunakan teknik ini dengan cara wawancara langsung kepada anggota partai politik divisi politik serta masyarakat terkait pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik di Kabupaten Batang.

c.) Teknik Dokumentasi

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data ini dengan mengumpulkan arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti menggunakan metode ini dengan cara menelaah buku-buku, teori-teori, pendapat, Undang-Undang, peraturan-peraturan yang menunjang dan relevan dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Berdasarkan hasil pengumpulan data, peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan hasil penelitian yang kemudian diolah dan disusun secara sistematis, kemudian peneliti menggunakan logika berfikir induktif dalam penarikan kesimpulan. Logika berfikir induktif digunakan dalam menganalisis data hasil penelitian yang kemudian di deskriptifkan secara verbal, atau dengan kata lain yaitu menganalisis data yang berasal dari faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan metode induktif ini peneliti menggunakan hasil penelitian di lapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya menemukan kesimpulan dari hasil yang ada di lapangan

yang berguna untuk menjawab permasalahan yang ada dalam rumusan masalah.²²Penelitian juga menggunakan metode analisis preskriptif yaitu analisis yang hasilnya memberikan nilai atau pendapat yang seharusnya benar atau salah, bagaimana seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²³

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil dari penelitian ini terbagi dalam lima bab yang memiliki tujuan agar memudahkan pemahaman serta pembahasan permasalahan yang diteliti sehingga pembahasan mampu terarah dengan baik dan benar. Sistematika pembahasannya yaitu sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Landasan Teori yang berisi teori-teori. Meliputi tentang pengertian partai politik, fungsi, tujuan partai politik, pengertian, peran politik dan tentang pendidikan politik sesuai ketentuan pasal 34B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik

Bab ketiga, Pelaksanaan Pendidikan Politik yang berisi uraian tentang gambaran umum daerah Kabupaten Batang dan latar belakang mengenai partai politik yang akan diteliti dan bab ini berisi uraian tentang

²²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 156.

²³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme.....*, h. 184.

pelaksanaan peran partai politik dalam pendidikan politik yang dilakukan oleh tiga partai.

Bab keempat, Hasil Penelitian yang berisi tentang analisis pelaksanaan peran partai politik dalam pendidikan politik yang dilakukan oleh tiga partai dan analisis implementasi pendidikan politik sesuai pasal 34B Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Bab kelima, Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan. Dalam bab ini berfungsi memberikan inti dari uraian yang dipaparkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Partai politik di Kabupaten Batang telah melaksanakan peranya yaitu pendidikan politik kepada masyarakat yang dikemas dalam berbagai kegiatan dengan tema-tema tertentu. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik Kabupaten Batang sudah sesuai dengan ajaran Islam hal tersebut dapat dilihat dari materi dan kegiatan yang disampaikan sesuai dengan nilai-nilai islam seperti nilai *ukhuwah*, nilai kebebasan, dan nilai musyawarah.
2. Implementasi pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik di Kabupaten Batang berupa kegiatan pendidikan politik yang diisi dengan penyampaian materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan berupa silaturahmi masyarakat, seminar, konsolidasi, sekolah kader partai, dan *reses* yang diselingi dengan pendidikan politik. Partai politik juga mengimplementasikan pasal tersebut dengan pengkaderan, yang dilakukan rutin yaitu tiga bulan sekali dilakukan oleh DPC partai PDI dan DPC PKB dan enam bulan sekali yang dilakukan oleh DPD partai Golkar. Namun, pelaksanaanya belum sampai pada

derajat merata dan intens karena sasarannya terbatas pada kader dan perwakilan dari masyarakat tertentu yang dipilih sehingga kurang menjangkau masyarakat luas. Pelaksanaan pendidikan politik juga tidak terjadwal secara tetap, pelaksanaannya hanya terbatas pada momen-momen tertentu sehingga pendidikan politik masyarakat kurang dirasakan masyarakat luas dan kurang membawa dampak hasil bagi peningkatan kesadaran politik masyarakat terutama peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum maupun pilkada.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap pelaksanaan pendidikan politik masyarakat oleh partai politik di kabupaten Batang, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, adapun saran tersebut yaitu :

1. Kepada partai politik di kabupaten Batang diharapkan:
 - a. Dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku, apa yang telah berjalan dapat terus dijalankan sebagaimana mestinya dengan lebih baik lagi. Sehingga masyarakat sebagai warga negara dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam bidang politik.
 - b. Dalam merumuskan program kerja mengenai pendidikan politik dapat seimbang dalam merumuskan kegiatan pendidikan politik untuk masyarakat dan untuk kader sehingga kegiatan pendidikan

politik sesuai dengan tujuannya sebagaimana dalam amanat Undang-undang yaitu untuk masyarakat luas.

- c. Agar pelaksanaan pendidikan politik dapat dijadwalkan dengan tetap, lebih luas merata dan sistematis agar pendidikan politik dapat dilaksanakan dengan lebih intens sehingga pesan-pesan dapat tersampaikan dengan baik.
2. Kepada pemerintah dan tokoh masyarakat diharapkan dapat ikut mendorong dan mendukung partai politik dalam melaksanakan peranya yaitu pendidikan politik masyarakat dan memberikan aspirasi terhadap pelaksanaan pendidikan politik masyarakat oleh partai politik karena itu merupakan tanggung jawab bersama sehingga dengan kerjasama dan dukungan dari semua pihak dapat tercapai tujuan yang dimuat dalam Undang-Undang.
 3. Kepada seluruh elemen masyarakat, diharapkan dapat mendukung partai politik dalam menjalankan fungsinya yaitu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat luas yang merupakan amanat Undang-Undang karena pendidikan politik bukan hanya tanggung jawab partai politik saja tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh warga negara sehingga dapat mewujudkan negara yang demokratis

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Batang. 2019. *Data Strategis Kabupaten Batang Tahun 2019*. Batang: CV Pradana Utama
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Handoyo dan Lestari. 2017. *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya
- Kartono, Kartini. 2009. *Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah. 2018. *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018*
- Labolo, Muhadam dan Ilham, Teguh. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia Teori, Konsep, dan Isu Strategis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rukajat. Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Satriawan, M. Imam dan Lutfi, Mustafa. 2015. *Risalah Hukum Dan Partai Politik Di Indonesia*. Lampung: PKKPU Fakultas Hukum Universitas Lampung
- Subekti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Sutrisman, Dudih. 2019. *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, dan Mahasiswa*. Jakarta: Guepedia

B. Jurnal

- Alfi Syahri, M. (2018). "Peran Wewenang Majelis Tuha Peut Dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsiyah*, Vol. III No. 1-22
- Fadillah, Ichwan Nur. (2017). "Pendidikan politik Oleh Partai NASDEM Kota Pekanbaru Tahun 2015-2016". *Jurnal FISIP*. Vol. IV No. 1
- Gusmansyah, Wery. (2019). "Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Menurut UU No.2 Tahun 2011 Dan Hukum Islam". *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*. Al-Imarah, Vol IV, No. II
- Haryanti, dkk. (2018). "Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Kader Perempuan Melalui Pendidikan Politik". *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*. Vol. XV, No. I
- Hasanah, Mila. (2014). "Pendidikan Politik Dalam Al-Qur'an". *Ijtihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan*. Vol. XII, No. XXI
- Kusuma, Gede Wijaya. (2020). "Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. I, No. 1
- Lanteda, Syaron Brigette dkk. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon". *Jurnal Administrasi Publik*. Vol. IV No. 048
- Masriyani dan Hermayanti. "Fungsi Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat". *Jurnal Wajah Hukum*. Vol. III, No. I
- Pasaribu, Payerli. (2017). "Peran Partai Politik Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik* 5 (1). h. 56.
- Syahri, M. Alfi. (2018). "Peran Wewenang Majelis Tuha Peut Dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fisip Unsiyah*. Vol. III No. 1-22
- Wicaksono, Itok. (2017). "Peran Partai Politik Dalam Partisipasi dan Aspirasi Politik di Tingkat Pemerintah Desa (The Role of Political Parties Participation And Political, Aspiration In The Village Government Level)". *Jember, Jurnal Politico* Vol. VII No.2

Wulandari,Sri.(2013).“Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Pelaksanaan Musrenbang di Kota Tarakan”. *Universitas Mulawarman: e-journal Adminisrasi Negara*. 1 (4)

Zawawi,Abdullah. (2015). “Politik Dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Ummul Qura*. Volume V, Nomor I, Maret 2015, h. 88-89

C. Skripsi

Sandika, Efen. (2018).“Peran PDI Perjuangan dalam Pendidikan Politik di Masyarakat Mnjelang Pilkada Mesuji Tahun 2017”. *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*, Lampung: UIN Raden Intan

Sitepu, Edy Sanjaya. (2019). “Peran Partai Keadilan Sejahtera Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015”.*SkripsiUIN Sumatera Utara*. Medan: UIN Sumatera Utara

D. Undang-Undang

Republik Indonesia, undang-undang tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun2011 tentang Partai Politik.

E. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik

F. Internet

Batangkab.go.id , <https://www.batangkab.go.id>, diakses pada tanggal 25 Maret 2021

<https://kesbangpolbatangkab.go.id>, diakses pada tanggal 25 April 2021

<https://pilkada2017.kpu.go.id/> , diakses pada tanggal 25 April 2021

<http://www.pdiperjuangan.id>, diakses tanggal 16 Maret 2021

<http://www.partaigolkar.com>, dikses tanggal 16 Maret 2021

<http://pkb.id>, Diakses tanggal 16 Maret 2021

G. Wawancara

Abdul Hakim Selaku Staff, *Wawancara Pribadi*, Kantor DPC PKB Kabupaten Batang, Tanggal 15 Maret 2021

Agus Susanto Selaku Staff, *Wawancara Pribadi*, kantor DPD Golkar Kabupaten Batang, Tangal 17 Maret 2021

Ahmad Faisol Selaku Warga Kecamatan Batang, *Wawancara Pribadi*, Batang, Tanggal 19 Maret 2021

Amat Wirai Sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi, *Wawancara Pribadi*, Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Batang, Tanggal 15 Maret 2021

Anggota KPU Kabupaten Batang. 2020. *Wawancara Pribadi* di Kantor KPU Kabupaten Batang

Danang Aji Saputra Selaku Wakil Ketua, *Wawancara Pribadi*, Kantor Kelurahan Simbang Jati Tulis, Tanggal 19 Maret 2021

Dwi Apriyani Selaku Staf, *Lembar Pertanggung Jawaban*, Kantor DPD Golkar Kabupaten Batang, 31 Maret 2021

Fazil Fadli Selaku Anggota DPAC Kecamatan Bandar , *Wawancara Pribadi*, Batang, 31 Maret 2021

Heri Kiswanto Selaku Pelaksana Ketua PAC Kecamatan Warungasem, *Wawancara Pribadi*, Batang, 7 April 2021

Ilham Manaamy Selaku Warga Desa Watesalit, *Wawancara Pribadi*, Batang, Tanggal 22 Maret 2021

Kahar Selaku Staff, *Laporan Pertanggung Jawaban*, Kantor Kantor DPC Pdi Perjuangan Kabupaten Batang, Tanggal 6 April 2021

Kirom Selaku Warga Desa Warungasem, *Wawancara Pribadi*, Batang, Tanggal 20 Maret 2021

Nining Sugiarti Selaku Pimpinan Kecamatan Warungasem, *Wawancara Pribadi*, Batang, 5 April 2021

Nur Hasan Selaku Wakil Ketua, *Wawancara Pribadi*, Kantor DPC PKB Kabupaten Batang, Tanggal 15 Maret 2021

Staff Kesatuan Bangsa dan Politik, *Wawancara Pribadi*, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Batang, Tanggal 22 Maret 2021

Sugiharto Selaku Ketua PAC Kecamatan Kandeman , *Wawancara Pribadi*, Batang, 30 Maret 2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **RINDA PUJI LESTARI**
NIM : **1517015**
Fakultas/Jurusan : **FASYA / HUKUM TATA NEGARA**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PERAN PARTAI POLITIK DALAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT
(Studi Implemenstasi Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang
Partai Politik Di Kabupaten Batang)**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya
dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya
sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN
Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya
ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 18 Juni 2021



RINDA PUJI LESTARI
NIM. 1517015

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.